

NAMA MEDIA : Fokus Jateng
TANGGAL : 16 November 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara



ADVERTORIAL PARLEMENTARIA

DPRD KOTA PEKALONGAN

DPRD Kota Pekalongan Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

PEKALONGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin 13 November 2023. Kedua Raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal Kota Pekalongan serta Raperda tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Wali Kota Pekalongan H Afzan Arslan Djunaid SE, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Wali Kota Pekalongan H Salahudin STP merasa bersyukur dengan telah disepakatinya dua Raperda Kota Pekalongan yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal Kota Pekalongan serta Raperda Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dalam rangka pengambilan keputusan DPRD Kota Pekalongan terhadap dua Raperda Kota Pekalongan pada Masa Sidang Tahun 2023.

Dijelaskan, sasaran Penyelenggaraan Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal ini, ditujukan kepada pekerja rentan sektor informal, baik yang merupakan pekerja bukan penerima upah, pekerja penerima upah, maupun warga masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai peserta program

Jamsosnaker. "Adapun Program Jamsosnaker Pekerja Rentan Sektor Informal ini, melalui pemberian fasilitasi atau bantuan kepesertaan dalam Jamsosnaker yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Walikota Pekalongan.

Dalam kesempatan itu, pihaknya berharap Penyelenggaraan Jamsosnaker Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal ini dapat memberikan perlindungan pekerja rentan dan keluarga, sehingga pekerjaan rentan dapat bekerja dengan tenang, nyaman dan produktif. Disamping itu, lanjut dia, dapat memberikan persiapan yang memadai bagi pekerja rentan dan atau keluarganya untuk mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem akibat pekerja yang menjadi tulang punggung keluarga mengalami kematian dan atau kecelakaan kerja.

Kemudian, dapat terbangun solidaritas, kolaborasi dan kebersamaan dalam mengatasi dan mencegah kemiskinan ekstrem pekerja rentan, sekaligus memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Peserta Jaminan Sosial dan atau anggota keluarganya akibat resiko kecelakaan kerja dan kematian.

"Ini juga untuk menjamin agar Peserta Jaminan Sosial memperoleh santunan uang tunai, apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja dan memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris Peserta Jaminan Sosial yang meninggal dunia," tutur Aaf, begitu Walikota Pekalongan akrab disapa.

Terkait Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Wali Kota Pekalongan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terdiri dari sistem nilai yang telah disepakati oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai perjanjian luhur yang harus menjadi pedoman, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem nilai Pancasila, kata dia, yang kebenarannya telah diyakini dan menjadi dasar atau pedoman bagi